

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

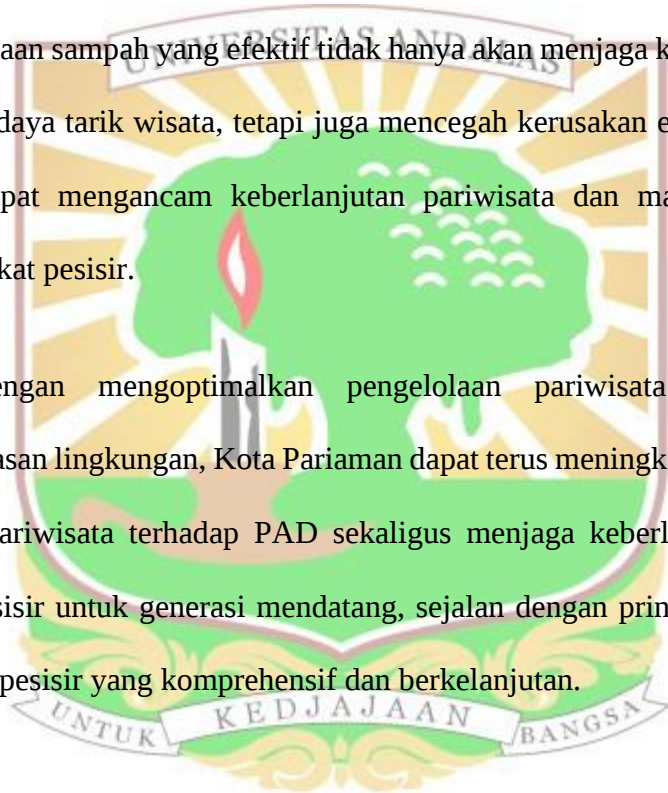
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki garis pantai yang panjang dengan potensi pariwisata bahari yang besar. Wilayah pesisir Indonesia tidak hanya menawarkan keindahan alam yang menawan, tetapi juga berperan sebagai sumber ekonomi penting bagi masyarakat lokal melalui sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata pantai di berbagai daerah pesisir Indonesia telah menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah. Namun, pengembangan tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan untuk menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan kelestarian ekosistem pesisir.

Di Sumatera Barat, pengembangan pariwisata pantai telah menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi alam yang dimiliki. Wilayah pesisir Sumatera Barat memiliki karakteristik geografis yang unik dengan pantai-pantai yang indah yang berpotensi menjadi daya tarik wisata unggulan. Salah satu daerah yang aktif mengembangkan sektor pariwisata pantai adalah Kota Pariaman. Kota Pariaman merupakan daerah pesisir yang mengembangkan pantai sebagai objek pariwisata dan kawasan strategis kota, dengan sektor pariwisata menjadi salah satu kontributor utama bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kota Pariaman. Pengembangan pariwisata pantai di Kota Pariaman merupakan contoh konkret penerapan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu yang memperhatikan aspek ekonomi dan lingkungan.

Keberhasilan pariwisata pantai di Kota Pariaman sangat bergantung pada kualitas lingkungan pesisir. Oleh karena itu, pengelolaan sampah di kawasan pantai menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan. Sistem pengelolaan sampah yang efektif tidak hanya akan menjaga keindahan pantai sebagai daya tarik wisata, tetapi juga mencegah kerusakan ekosistem pantai yang dapat mengancam keberlanjutan pariwisata dan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Dengan mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pantai yang berwawasan lingkungan, Kota Pariaman dapat terus meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir untuk generasi mendatang, sejalan dengan prinsip pengelolaan wilayah pesisir yang komprehensif dan berkelanjutan.



Tabel 1.1

Data Sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariama Tahun 2019-2023

Tahun	PDRB (Milliar Rupiah)	Sektor Utama
2019	12.345	Pertanian
2020	11.678	Pertanian
2021	13. 890	Parawisata
2022	14.567	Parawisata
2023	15.234	Parawisata

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pariaman 2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sektor pariwisata telah menjadi salah satu pilar utama ekonomi Kota Pariaman, dengan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara keseluruhan, sektor pariwisata tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha baru bagi masyarakat lokal, sehingga memberikan dampak positif yang luas bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kota Pariaman. Untuk itu Kota Pariaman harus lebih memperhatikan dalam mengelolanya agar pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan, mencakup aspek pelestarian lingkungan, peningkatan infrastruktur, serta penguatan sumber daya manusia lokal untuk memberikan pelayanan yang baik bagi wisatawan, dengan demikian potensi pariwisata dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan di Kota Pariaman. Salah satu destinasi wisata yang termasuk dalam wisata populer di Kota Pariaman adalah adalah wisata pantai gandoriah,

Pantai Gandoriah terletak di pusat transportasi dan pusat perbelanjaan seperti stasiun kereta api, toko oleh-oleh, kuliner, dan pasar Pariaman, yang membuatnya lebih mudah diakses oleh wisatawan, kawasan pantai ini juga ramah keluarga dengan berbagai wahana permainan dan kuliner khas pariaman. Pantai Gandoriah memiliki daya tarik bagi wisatawan karena keindahan alamnya. Selain itu, pantai gandoriah sering dijadikan lokasi untuk berbagai acara dan festival yang menambah daya tariknya sebagai destinasi wisata unggulan di Kota Pariaman.

Tabel 1.2
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Pantai Gandoriah Dari Tahun 2019-2023
Naik Turun

No	Tahun	Jumlah Pengunjung (Orang)
1	2019	98.432
2	2020	75.000
3	2021	80.000
4	2022	2.200.234
5	2023	2.201.100

Sumber: Kota Pariaman 2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat jumlah kunjungan wisatwan pasca pandemi covid-19 mengalami peningkatan, hal ini membuktikan bahwa Pantai Gandoriah memiliki nilai dan daya tarik bagi wisatawan. Peningkatan jumlah pengunjung ini mencerminkan popularitas pantai, namun juga membawa dampak negatif terhadap kebersihan lingkungan yang memerlukan perhatian lebih dari pengelola wisata dan masyarakat. oleh karena itu, pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan pantai agar tetap menjadi destinasi wisata yang nyaman dan menarik bagi semua pengunjung.

Permasalahan sampah di kawasan wisata Pantai Gandoriah merupakan isu yang kompleks dan mendesak untuk segera ditangani. Sebagai destinasi wisata yang populer, pantai gandoriah menarik banyak pengunjung, terutama masyarakat lokal. Sayangnya, banyak dari mereka yang kurang disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya, sehingga sampah plastik, kertas, dan sisa makanan sering kali berserakan di sepanjang pantai.

Gambar 1. Tumpukan sampah di pantai gandoriah



Sumber: observasi awal

Semakin banyak wisatawan yang mengunjungi Pantai Gandoriah di Pariaman, semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Kondisi ini tidak hanya merusak pemandangan alam yang indah, tetapi juga mencemari lingkungan sekitar dan laut. Sampah plastik yang berserakan di pantai dapat membahayakan kehidupan biota laut, seperti rusaknya terumbu karang serta penyu dan ikan yang bisa saja menelan sampah tersebut atau terjat di dalamnya. Selain itu, keberadaan sampah dapat menurunkan kualitas air laut, yang pada akhirnya mengganggu ekosistem laut dan kesehatan masyarakat yang beraktivitas di sekitar pantai..

Tabel 1.3

Jumlah Sampah yang ditemukan di Pantai Pariaman 2019-2023

Tahun	Jumlah Sampah (Liter per Hari)	Komposisi Sampah (%)
2019	2.200.000	80% organik, 20% anorganik
2020	2.500.000	81% organik, 19% anorganik
2021	2.700.000	82% organik, 18% anorganik
2022	2.800.000	83% organik, 17% anorganik
2023	2.900.000	84% organik, 16% anorganik

Sumber: Dinas Perkim LH Kota Pariaman 2024

Berdasarkan data produksi sampah yang dihasilkan di Pantai Pariaman selama lima tahun terakhir, jumlah sampah terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, tercatat jumlah sampah sekitar 2.200.000 liter per hari, dengan 80% sampah organik dan 20% sampah anorganik. Angka ini meningkat menjadi 2.900.000 liter per hari pada tahun 2023, dengan persentase sampah organik mencapai 84% dan sampah anorganik 16%. Peningkatan volume sampah ini mencerminkan peningkatan jumlah pengunjung dan aktivitas di pantai.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bahri & Purnama (2019) mengenai pengelolaan sampah di kawasan wisata Pantai Padang, ditemukan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan sampah adalah kurangnya kesadaran pengunjung dan pedagang dalam membuang sampah pada tempatnya. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa sistem pengelolaan sampah yang tidak efektif, seperti kurangnya tempat sampah dan jadwal pengangkutan yang tidak teratur, berkontribusi pada menumpuknya sampah di kawasan pantai. Hal ini sejalan dengan kondisi yang terjadi di

Pantai Gandoriah, di mana peningkatan jumlah pengunjung tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Suryani & Rahman (2022) di kawasan wisata Pantai Anyer menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan sampah dapat secara signifikan mengurangi permasalahan sampah di kawasan wisata pantai. Penelitian tersebut menemukan bahwa program bank sampah dan edukasi lingkungan yang melibatkan masyarakat lokal berhasil mengurangi volume sampah hingga 45% dalam waktu satu tahun. Model pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini dapat menjadi referensi bagi pengelolaan sampah di Pantai Gandoriah, mengingat karakteristik wisata dan permasalahan sampah yang serupa.

Selain berdampak pada lingkungan, permasalahan sampah di Pantai Gandoriah juga mempengaruhi persepsi dan kepuasan wisatawan terhadap destinasi wisata ini. Menumpuknya sampah di sepanjang pantai dapat menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung kembali, yang pada akhirnya akan berdampak pada pendapatan masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata. Para pedagang makanan, penyedia jasa wisata, dan pelaku usaha kecil lainnya yang beroperasi di sekitar Pantai Gandoriah akan mengalami penurunan pendapatan jika jumlah wisatawan menurun akibat buruknya kondisi kebersihan pantai. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pengelola wisata, masyarakat lokal, dan wisatawan untuk

mengatasi permasalahan sampah ini agar Pantai Gandorih dapat terus berkembang sebagai destinasi wisata unggulan yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan di Kota Pariaman. Berikut media Televisi lokal yang memberitakan terkait sampah yang berserakan di objek wisata Kota Pariaman:



Gambar 1.2 Gambar Sampah Berserakan di Objek Wisata Kota Pariaman
Sumber: TVRI SUMBAR ,2019

Permasalahan sampah di Pantai Gandorih, Pariaman, telah menjadi isu lingkungan yang mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Pariaman. Masalah ini semakin tampak nyata ketika event-event besar seperti Festival Tabuik Pariaman 2025 digelar, dimana tingginya antusiasme masyarakat dan wisatawan menyisakan tumpukan sampah di sepanjang kawasan wisata unggulan ini. Kondisi tersebut mengganggu keindahan pantai, kebersihan, serta menimbulkan aroma tidak sedap bagi pengunjung, sehingga berpotensi menurunkan daya tarik wisata dan berdampak negatif terhadap perekonomian lokal (TVRI SUMBAR, 2019).

Pemko Pariaman secara rutin menggelar berbagai program pembersihan seperti Gerakan Satu Jam Menyapu (GSM) dan Aksi Bersih Pantai yang melibatkan ratusan ASN dan masyarakat. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kebersihan destinasi wisata, namun di sisi lain juga mengindikasikan bahwa masalah sampah di kawasan pantai masih menjadi tantangan berkelanjutan yang memerlukan kesadaran kolektif dari semua pihak, termasuk pengunjung dan pedagang, untuk membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kelestarian lingkungan pantai.

Masalah sampah di kawasan wisata pantai seperti Pantai Gandoriah menjadi sangat penting mengingat dampak jangka panjang yang ditimbulkan terhadap ekosistem laut dan keberlanjutan pariwisata. Data menunjukkan bahwa lebih dari 8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun, dimana lebih dari 70 persen sampah plastik di perairan berasal dari aktivitas manusia di daratan, termasuk yang melalui sungai dan pantai yang tidak dikelola dengan baik. Sampah plastik yang memerlukan ratusan tahun untuk terurai ini tidak hanya mengancam biota laut yang sering kali salah mengira plastik sebagai makanan, tetapi juga merusak habitat mereka dan mengganggu rantai makanan laut. Selain itu, pantai yang penuh sampah dapat mengurangi daya tarik wisatawan dan merusak perekonomian lokal, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang pola persebaran sampah, dampaknya terhadap lingkungan, serta merumuskan

strategi pengelolaan yang efektif untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pantai dan industri pariwisata di masa depan (Tempo, 2024).

Mengingat kompleksitas permasalahan sampah di Pantai Gandoriah yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah wisatawan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dalam pengelolaannya. Sistem pengelolaan sampah yang ada saat ini belum mampu mengimbangi volume sampah yang dihasilkan, terlihat dari masih banyaknya tumpukan sampah yang berserakan di sepanjang pantai. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya kesadaran pengunjung dalam membuang sampah pada tempatnya, terbatasnya jumlah tempat sampah yang tersedia, serta sistem pengangkutan sampah yang belum terkelola dengan baik. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah juga menjadi kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sampah masih minim, padahal peran aktif masyarakat sangat penting dalam menjaga kebersihan pantai. Pedagang kaki lima dan penyedia jasa wisata yang beroperasi di sekitar pantai juga belum sepenuhnya memiliki kesadaran untuk mengelola sampah yang dihasilkan dari aktivitas usaha mereka. Tanpa adanya perubahan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan peningkatan kesadaran semua pihak, permasalahan sampah di Pantai Gandoriah akan terus berlanjut dan berpotensi mengancam keberlanjutan sektor pariwisata yang telah menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi Kota Pariaman.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagai salah satu objek wisata yang sangat populer di Kota Pariaman, Pantai Gandoriah menjadi sumber pendapatan utama daerah di sektor pariwisata. Namun permasalahan sampah di Pantai Gandoriah merupakan isu kompleks dan mendesak untuk diatasi, Permasalahan sampah di Pantai Gandoriah tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan dan ekosistem laut, tetapi juga mengancam keberlanjutan sektor pariwisata yang telah menjadi kontributor utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman sejak tahun 2021. Menumpuknya sampah di sepanjang pantai dapat menurunkan daya tarik wisata, mengurangi minat kunjungan ulang wisatawan, dan pada akhirnya berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat lokal yang bergantung pada sektor pariwisata. Dengan jumlah pengunjung mencapai ribuan orang setiap tahunnya, tentunya pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mengelola sampah, yang mencapai ratusan ton per tahun, sehingga memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Pengelolaan sampah yang efektif di kawasan wisata Pantai Gandoriah merupakan kunci untuk menjaga kebersihan, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan, hal ini memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku pariwisata. Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah ***“Bagaimana upaya dan kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sampah di kawasan Wisata Pantai Gandoriah Kota Pariama?”***.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan, secara umum tujuan penelitian ini adalah :

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan sampah di Kawasan Wisata Pantai Gandoriah Kota Pariaman.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi penyebab permasalahan sampah di kawasan wisata Pantai Gandoriah Kota Pariaman serta menganalisis dampaknya terhadap lingkungan dan aktivitas pariwisata di lokasi tersebut.
2. Mendeskripsikan kebijakan dan program pemerintah daerah Kota Pariaman dalam pengelolaan sampah di kawasan wisata Pantai Gandoriah serta merumuskan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan keberlanjutan pengelolaan sampah di kawasan tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Secara akademis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta mendapatkan pemahaman

yang lebih mendalam, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan wawasan yang lebih akurat dan detail tentang topik yang diteliti serta memberikan wawasan yang berharga untuk menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan, khususnya berhubungan dengan peran pemerintah kota dalam menangani permasalahan sampah di kawasan wisata Pantai Gandoriah Kota Pariaman atau bidang sosiologi yaitu sosiologi lingkungan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada seluruh pihak lain yang terkait serta bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.

1.5 Tinjauan pustaka

1.5.1 Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan (Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, 2014).

Pemerintah daerah memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Fungsi tersebut mencakup tiga hal utama yaitu fungsi pelayanan masyarakat (public service function), fungsi pembangunan (development function), dan fungsi perlindungan (protection function). Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya finansial untuk kesejahteraan masyarakat di wilayahnya (Wasistiono, S., & Simangunsong, 2015).

Dalam struktur organisasinya, pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah yang dibantu oleh wakil kepala daerah dan perangkat daerah lainnya. Perangkat daerah terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Masing-masing perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi yang berbeda namun tetap saling berkoordinasi dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Struktur organisasi ini dirancang untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan daerah digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi daerahnya, melaksanakan program-program pembangunan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut. Pembangunan daerah harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan (Wahyudin Rahman, Sutrisno K. Djawa, 2023).

Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan katalisator yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya inisiatif dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan daerah.

1.5.2 Konsep Sampah

1. Pengertian Sampah

Definisi sampah, menurut berbagai ahli termasuk (Basriyanta, 2007), dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menurut Kamus Lingkungan (1994), sampah adalah bahan yang tidak memiliki nilai atau tidak berharga untuk digunakan dalam produksi atau pemakaian sehari-hari.
- b. Dalam Istilah Lingkungan untuk Manajemen, Ecolink (1996), sampah diartikan sebagai bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam, yang belum memiliki nilai ekonomis.
- c. Dr. M.Sc. Tanjung (1996) mendefinisikan sampah sebagai sesuatu yang tidak berguna lagi dan dibuang oleh pemakai atau pemiliknya semula.
- d. Prof. Ir. Radyastuti (1996) menganggap sampah sebagai sumber daya yang tidak siap pakai.
- e. Menurut Basriyanta, sampah adalah barang yang dianggap tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik sebelumnya, meskipun masih bisa dimanfaatkan jika dikelola dengan benar (Basriyanta, 2007)

Sampah sendiri adalah sisa material setelah berakhirnya suatu proses yang tidak diinginkan, dan tumpukan sampah berasal dari berbagai sumber seperti pasar, restoran, pertokoan, rumah sakit, perumahan, perkantoran, sekolah, dan lain sebagainya (Suryati, 2014).

World Health Organization (WHO) mendefinisikan sampah sebagai sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, tidak digunakan, atau sesuatu yang dibuang

yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak disengaja dengan sendirinya (Tosepu et al., 2016). Sampah, pada dasarnya, adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia atau alam yang belum memiliki nilai ekonomis, dan dapat berwujud padat, cair, atau gas. Sifat sampah sebagai konsep buatan dan konsekuensi dari aktivitas manusia membuatnya berbeda dari produk-produk alam yang tidak mengenal adanya sampah (Suryati, 2014).

Sampah dapat berupa bahan padat buangan dari berbagai kegiatan seperti rumah tangga, hotel, pasar, industri, rumah makan, perkantoran, atau aktivitas manusia lainnya. Bahan ini bisa melibatkan puing-puing bahan bangunan, besi tua bekas kendaraan bermotor, dan merupakan hasil sampingan yang tidak terpakai dari aktivitas manusia (Purwendro & Nurhidayat, 2007).

2. Jenis-Jenis Sampah

Sampah, yang mencakup semua benda sisa yang tidak terpakai dan telah dibuang, dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis untuk memudahkan dalam teknis pembuangannya, seperti yang dijelaskan oleh Stephen et al. (2019):

- a. Solid waste, umumnya disebut refuse (sampah basah), terdiri dari bahan-bahan organik yang secara teknis dapat dimusnahkan.
- b. Liquid waste atau waste water (air buangan/sampah cair).
- c. Atmospheric waste (gas buangan).
- d. Human waste adalah sebagai human excreta disposal.
- e. Manure (kotoran hewan).

- f. Sampah berbahaya (bahan berbahaya dan beracun = B3).

Jenis sampah juga dapat dibedakan menurut Suryati (Suryati, 2014), antara lain:

- a. Berdasarkan Bentuk

Tempat sampah di area publik dan rumah dicat dengan warna yang berbeda sesuai dengan jenis sampahnya. Sampah organik, yang mudah terurai secara alami, melibatkan contoh seperti daun kering, rumput kering, serbuk gergaji, dan limbah dapur. Di sisi lain, sampah anorganik mencakup logam, botol kaca, styrofoam, plastik, dan kertas yang mengilap.

- b. Berdasarkan Sumber

Sampah dibedakan menjadi limbah padat domestik dan non-domestik. Limbah padat domestik berasal dari perumahan, perkantoran, rumah sakit, dan sebagainya, sedangkan limbah padat non-domestik berasal dari hutan, perkebunan, pertanian, perindustrian, dan lainnya.

- c. Berdasarkan Tingkat Bahaya

Sampah dikategorikan berdasarkan tingkat bahaya menjadi limbah B3 (berbahaya dan beracun) dan limbah non-B3. Limbah B3 mencakup bahan seperti pemutih, detergen, dan racun tikus, sementara limbah non-B3 seperti kaca mata rusak dan botol bekas minuman tidak berbahaya.

- d. Berdasarkan Cara Pengelolaan dan Pemanfaatannya

Sampah dibedakan berdasarkan cara pengelolaan dan pemanfaatannya menjadi sampah basah, yang melibatkan bahan organik mudah membusuk seperti sisa makanan, dan sampah kering yang terdiri dari logam, nonlogam, dan sampah lembut seperti debu dan abu.

1.5.3 Wisata Pantai

Wisata pantai adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam pantai beserta komponen pendukungnya, baik alami maupun buatan atau gabungan keduanya. Komponen tersebut meliputi keindahan pantai yang ditandai dengan pasir putih, ombak yang memukau, terumbu karang, biota laut, serta berbagai fasilitas pendukung seperti tempat berenang, area bermain, restoran, dan penginapan. Keberadaan wisata pantai tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk melakukan berbagai aktivitas rekreasi seperti berenang, snorkeling, berselancar, atau sekadar bersantai menikmati pemandangan (Janianton Damanik & Helmut F. Webe, 2006).

Pengembangan wisata pantai perlu memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Hal ini mencakup pengelolaan sampah yang efektif, perlindungan ekosistem pantai, pelestarian budaya lokal, serta pemberdayaan masyarakat setempat. Pengelolaan wisata pantai yang baik harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, sehingga manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang dan masa depan. Pengembangan fasilitas dan infrastruktur pendukung wisata pantai juga harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan

agar tidak menimbulkan kerusakan ekosistem pantai (Nugroho, A., & Sutanto, 2021).

Wisata pantai memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Kehadiran wisatawan membuka kesempatan bagi penduduk setempat untuk mengembangkan berbagai usaha seperti penyediaan jasa wisata, kuliner, penginapan, dan penjualan cinderamata. Selain itu, retribusi dari wisata pantai juga berkontribusi pada pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengembangan wisata pantai juga harus memperhatikan aspek sosial budaya agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat lokal (Kusuma, R., & Pratama, 2022).

Keberhasilan pengembangan wisata pantai tidak lepas dari peran aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pengelola wisata, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik antar stakeholder untuk memastikan pengelolaan wisata pantai berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi semua pihak. Pemerintah berperan dalam menyediakan regulasi dan infrastruktur dasar, sementara pengelola wisata dan pelaku usaha bertanggung jawab dalam pengembangan fasilitas dan layanan wisata. Masyarakat lokal juga memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan dan keamanan kawasan wisata, serta melestarikan budaya lokal yang menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan (Widodo, S., & Sari, 2023).

Wisata pantai juga berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal melalui program-program konservasi dan pelestarian. Ketika dikelola dengan baik, aktivitas wisata pantai dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan wisatawan tentang pentingnya menjaga ekosistem pantai. Program-program seperti penanaman mangrove, perlindungan terumbu karang, dan pelestarian habitat penyu dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan wisata, sehingga memberikan nilai edukasi sekaligus mendukung upaya konservasi lingkungan. Selain itu, wisata pantai juga menjadi media untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya masyarakat pesisir kepada wisatawan, seperti tradisi nelayan, kuliner khas, dan kesenian tradisional (Rahman & Putri, 2022).

Pengembangan wisata pantai di era digital tidak dapat dipisahkan dari peran teknologi informasi dan media sosial. Kemudahan akses informasi dan promosi melalui platform digital telah mengubah pola perilaku wisatawan dalam merencanakan perjalanan wisata. Destinasi wisata pantai yang memiliki spot-spot instagramable dan fasilitas pendukung yang modern menjadi daya tarik tersendiri bagi generasi milenial dan Gen-Z. Namun, pengembangan fasilitas modern ini harus tetap memperhatikan karakteristik dan kearifan lokal agar tidak menghilangkan keunikan dan autentisitas destinasi wisata pantai (Hermawan & Saputra, 2021).

Kesuksesan pengembangan wisata pantai juga ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola dampak perubahan iklim dan bencana alam. Fenomena seperti kenaikan permukaan air laut, abrasi pantai, dan cuaca ekstrem dapat mengancam

keberlanjutan wisata pantai. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptasi dan mitigasi yang tepat, seperti pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, sistem peringatan dini, serta edukasi kepada masyarakat dan wisatawan tentang kesiapsiagaan bencana. Pengelola wisata pantai juga perlu mengembangkan rencana kontingensi untuk menghadapi situasi darurat yang dapat mengganggu aktivitas wisata (Gunawan & Yuliana, 2023).

Aspek keselamatan dan kenyamanan wisatawan juga menjadi faktor krusial dalam pengembangan wisata pantai. Penyediaan fasilitas keselamatan seperti pos penjaga pantai, peralatan pertolongan pertama, dan rambu-rambu peringatan harus menjadi prioritas. Selain itu, pengaturan zonasi aktivitas wisata seperti area berenang, area berselancar, dan area konservasi perlu diimplementasikan dengan jelas untuk menghindari konflik kepentingan dan menjamin keselamatan pengunjung. Pelatihan dan sertifikasi bagi petugas keselamatan pantai juga penting untuk memastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai dalam menangani situasi darurat (Pratiwi & Santoso, 2022).

Inovasi dalam pengembangan produk dan layanan wisata pantai terus berkembang untuk memenuhi tuntutan pasar yang semakin beragam. Konsep wisata pantai tematik, eco-resort, marine tourism, dan wisata edukasi berbasis pantai menjadi tren baru yang menarik minat wisatawan. Pengembangan atraksi wisata yang unik dan berbeda dari destinasi lain dapat menjadi keunggulan kompetitif dalam menarik wisatawan. Namun, inovasi ini harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan dan tidak mengorbankan

kelestarian lingkungan demi keuntungan ekonomi semata (Kusuma & Wijaya, 2023).

1.5.4 Sampah Di Kawasan Wisata Pantai

Sampah di kawasan wisata pantai telah menjadi permasalahan serius yang mengancam keberlanjutan pariwisata dan kelestarian ekosistem pesisir. Peningkatan jumlah wisatawan yang tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai mengakibatkan penumpukan sampah di berbagai lokasi wisata pantai. Sampah yang dihasilkan dari aktivitas wisatawan sangat beragam, mulai dari sampah organik seperti sisa makanan dan dedaunan, hingga sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan styrofoam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyorini dan Pramudya (2021) di beberapa destinasi wisata pantai populer di Indonesia, ditemukan bahwa 60-70% sampah yang ditemukan di kawasan pantai adalah sampah plastik yang sebagian besar berasal dari aktivitas wisatawan, seperti kemasan makanan, botol minuman, kantong plastik, dan peralatan piknik sekali pakai. Kondisi ini tidak hanya mengganggu estetika pantai tetapi juga mengancam kehidupan biota laut dan kesehatan manusia melalui mikroplastik yang masuk ke dalam rantai makanan.

Pengelolaan sampah di kawasan wisata pantai menghadapi berbagai tantangan kompleks yang saling berkaitan. Menurut kajian komprehensif yang dilakukan oleh Hartono, Widyastuti, dan Prakoso (2022), permasalahan utama dalam pengelolaan sampah pantai meliputi keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, rendahnya kesadaran wisatawan dan pelaku usaha wisata, serta lemahnya

koordinasi antar pemangku kepentingan. Infrastruktur dasar seperti tempat sampah, tempat pengumpulan sampah sementara, dan armada pengangkut sampah seringkali tidak sebanding dengan volume sampah yang dihasilkan. Selain itu, sistem pengangkutan sampah yang tidak teratur dan keterbatasan teknologi pengolahan sampah menyebabkan sampah menumpuk di berbagai titik di kawasan pantai. Studi tersebut juga mengungkapkan bahwa hanya 30% dari total sampah yang dihasilkan di kawasan wisata pantai yang terkelola dengan baik, sementara sisanya terbuang ke laut atau tertimbun di pantai.

Dampak lingkungan dan ekonomi dari permasalahan sampah di kawasan wisata pantai sangat signifikan dan bersifat jangka panjang. Penelitian longitudinal yang dilakukan oleh Rahmawati, Sutrisno, dan Utami (2023) menunjukkan bahwa keberadaan sampah di pantai telah menyebabkan penurunan kualitas air laut, kerusakan terumbu karang, dan berkurangnya populasi biota laut. Sampah plastik yang terurai menjadi mikroplastik ditemukan dalam konsentrasi yang mengkhawatirkan di sedimen pantai dan tubuh berbagai organisme laut. Dari aspek ekonomi, citra destinasi wisata yang buruk akibat sampah menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan hingga 40% di beberapa destinasi wisata pantai populer. Hal ini berdampak langsung pada pendapatan masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata, seperti penurunan omset pedagang hingga 50% dan penutupan beberapa usaha wisata lokal.

Upaya penanganan sampah di kawasan wisata pantai membutuhkan pendekatan terintegrasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan studi implementasi program pengelolaan sampah pantai yang

dilakukan oleh Kurniawan, Hidayat, dan Permana (2023), keberhasilan pengelolaan sampah pantai ditentukan oleh tiga faktor utama: sistem pengelolaan sampah yang efektif, partisipasi aktif masyarakat, dan dukungan kebijakan pemerintah. Program bank sampah pantai, sistem reward and punishment bagi wisatawan dan pelaku usaha, serta edukasi lingkungan terbukti efektif dalam mengurangi volume sampah hingga 45% dalam waktu satu tahun di beberapa destinasi wisata pantai percontohan. Selain itu, penggunaan teknologi seperti tempat sampah pintar, aplikasi pelaporan sampah, dan sistem monitoring berbasis teknologi informasi juga berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah pantai. Namun, keberlanjutan program-program tersebut sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan dukungan pendanaan yang memadai dari pemerintah serta partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan.

1.5.5 Tinjauan Sosiologis

Teori Struktural Fungsional yang dikembangkan oleh Robert K. Merton merupakan salah satu perspektif utama dalam sosiologi yang melihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berhubungan dan memiliki fungsi masing-masing. Merton mengembangkan teori ini sebagai kritik dan penyempurnaan terhadap teori fungsionalisme klasik yang dianggap terlalu kaku dalam memandang fungsi sosial. Menurut Merton, setiap elemen dalam struktur sosial tidak hanya memiliki fungsi positif tetapi juga dapat memiliki fungsi negatif atau bahkan disfungsi. Hal ini membuat teorinya lebih komprehensif dalam menjelaskan dinamika sosial yang kompleks dalam masyarakat modern (Johnson, P., & Peterson, 2021).

Konsep penting dalam teori Merton adalah perbedaan antara fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest adalah konsekuensi yang diharapkan dan diakui dari suatu tindakan atau struktur sosial, sementara fungsi laten adalah konsekuensi yang tidak diharapkan atau tidak disadari. Merton berpendapat bahwa analisis sosiologis harus memperhatikan kedua jenis fungsi ini untuk memahami secara utuh bagaimana suatu struktur sosial beroperasi. Pemahaman tentang fungsi laten menjadi penting karena seringkali memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas dan perubahan sosial, meskipun tidak terlihat secara langsung (Thompson, R., & Rodriguez, 2022).

Merton juga memperkenalkan konsep disfungsi dalam analisis fungsionalnya, yang mengacu pada konsekuensi negatif dari suatu struktur atau institusi sosial terhadap sistem sosial yang lebih luas. Disfungsi ini dapat mengganggu keseimbangan sistem dan mendorong terjadinya perubahan sosial. Berbeda dengan pendahulunya yang cenderung menekankan aspek keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat, Merton mengakui bahwa ketegangan dan konflik merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika sosial. Pemahaman tentang disfungsi ini membantu menjelaskan mengapa perubahan sosial terjadi dan bagaimana masyarakat beradaptasi terhadap perubahan tersebut (Wilson, E., & Garcia, 2023).

Salah satu kontribusi penting Merton dalam teori struktural fungsional adalah konsep alternatif fungsional. Konsep ini menunjukkan bahwa suatu fungsi sosial dapat dipenuhi oleh berbagai struktur atau institusi yang berbeda. Dengan kata lain, tidak ada struktur sosial yang mutlak diperlukan untuk memenuhi suatu

fungsi tertentu. Pemahaman ini membuka perspektif baru dalam analisis sosial dengan mengakui fleksibilitas dan variasi dalam cara masyarakat memenuhi kebutuhan fungsionalnya. Hal ini juga memperkaya pemahaman tentang bagaimana masyarakat dapat beradaptasi terhadap perubahan tanpa kehilangan fungsi-fungsi pentingnya (Anderson, M., & Martinez, 2022).

Merton juga mengembangkan konsep "middle-range theory" yang menjembatani kesenjangan antara teori abstrak dengan penelitian empiris. Pendekatan ini menekankan pentingnya mengembangkan teori yang dapat diuji secara empiris dan memiliki relevansi praktis dalam memahami fenomena sosial spesifik. Middle-range theory memungkinkan peneliti sosial untuk menganalisis hubungan antara berbagai variabel sosial tanpa harus terjebak dalam abstraksi teoretis yang terlalu luas atau observasi empiris yang terlalu sempit. Pendekatan ini telah mempengaruhi perkembangan metodologi penelitian sosiologi dan memperkaya pemahaman tentang berbagai fenomena sosial kontemporer (Lee, M., & Harrison, 2023).

Relevansi teori Merton dalam konteks kontemporer terletak pada kemampuannya menjelaskan kompleksitas struktur sosial modern dan dampaknya terhadap individu maupun kelompok. Teorinya memberikan kerangka analitis yang berguna untuk memahami bagaimana berbagai institusi sosial saling berinteraksi dan bagaimana perubahan dalam satu aspek sistem sosial dapat mempengaruhi aspek-aspek lainnya. Pemahaman tentang fungsi manifest, fungsi laten, dan disfungsi membantu mengidentifikasi konsekuensi tidak terduga dari kebijakan

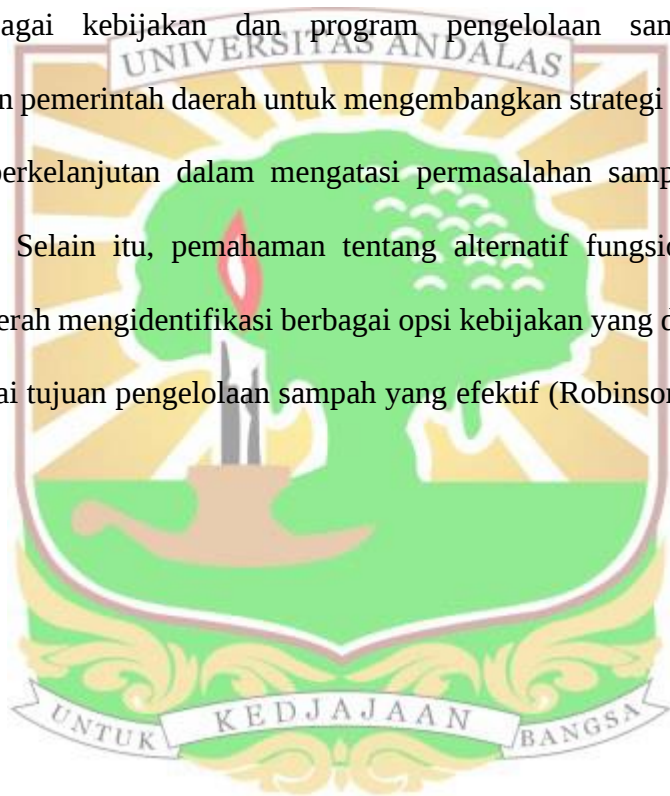
sosial dan program pembangunan, serta membantu dalam merancang intervensi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah sosial (Brown, S., & Ramirez, 2023).

Dalam konteks pengelolaan sampah di kawasan wisata Pantai Gandoriah, teori struktural fungsional Merton dapat diterapkan untuk menganalisis peran pemerintah daerah sebagai struktur formal yang memiliki fungsi manifest dalam menangani permasalahan sampah. Pemerintah daerah, melalui berbagai dinas dan institusi terkait, memiliki tanggung jawab formal untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan pantai. Namun, implementasi kebijakan pengelolaan sampah juga menghasilkan fungsi laten seperti terbukanya peluang ekonomi baru melalui bank sampah, meningkatnya kesadaran lingkungan masyarakat, dan terbangunnya jejaring sosial antara pemerintah dengan komunitas lokal. Analisis fungsi manifest dan laten ini membantu memahami kompleksitas dampak dari kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan pemerintah daerah (Williams, J., & Thompson, 2023).

Konsep disfungsi dalam teori Merton juga relevan dalam menganalisis berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola sampah di Pantai Gandoriah. Misalnya, sistem birokrasi yang kaku dalam pengelolaan anggaran dapat menghambat respons cepat terhadap permasalahan sampah yang mendesak. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antar instansi pemerintah dapat mengakibatkan ketidakefektifan dalam implementasi program pengelolaan sampah. Pemahaman tentang disfungsi ini membantu mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dalam sistem pengelolaan sampah dan

mendorong pengembangan solusi yang lebih efektif (Martinez, C., & Anderson, 2023)

Pendekatan middle-range theory Merton juga sangat bermanfaat dalam menganalisis efektivitas program-program pengelolaan sampah yang diterapkan pemerintah daerah di Pantai Gandoriah. Dengan mengintegrasikan analisis teoretis dan data empiris, dapat dilakukan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap dampak berbagai kebijakan dan program pengelolaan sampah. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengembangkan strategi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan sampah di kawasan wisata pantai. Selain itu, pemahaman tentang alternatif fungsional membantu pemerintah daerah mengidentifikasi berbagai opsi kebijakan yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang efektif (Robinson, D., & Garcia, 2023)



1.5.6 Penelitian Relevan

Tabel 1.4 Penelitian relevan

Penelitian	Judul	Tujuan	Hasil
Renaldi, Aldian (2021), Unigal Repository.	PERAN DINAS PERKIM LH DAN KEBERSIHAN DALAM PELAYANAN KEBERSIHAN DI OBJEK WISATA PANTAI PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN	untuk mengetahui peran Dinas Perkim LH dan Kebersihan dalam pelayanan kebersihan di objek wisata Pantai Pangandaran Kabupaten Pangandaran, hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Perkim LH dan Kebersihan dalam pelayanan kebersihan di objek wisata Pantai Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan upaya-upaya mengatasi hambatan yang dihadapi Dinas Perkim LH dan Kebersihan dalam pelayanan kebersihan di objek wisata Pantai Pangandaran Kabupaten Pangandaran.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Perkim LH dan Kebersihan dalam pelayanan kebersihan di objek wisata Pantai Pangandaran Kabupaten Pangandaran pada umumnya dilaksanakan dengan cukup baik. Sebagian besar informan menyatakan bahwa pelayanan kebersihan telah dilaksanakan dengan cukup baik, meskipun terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, seperti kurangnya penetapan aturan, kekurangan petugas, dan rendahnya kesadaran masyarakat

Penelitian	Judul	Tujuan	Hasil
Ermawati, E. A., Amalia, F. R., & Mukti, M. (2018), Journal of Tourism and Creativity.	Analisis Strategi Pengelolaan Sampah di Tiga Lokasi Wisata Kabupaten Banyuwangi	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi dan distribusi sampah yang ada di tiga objek wisata di Banyuwangi, yaitu di Pulau Santen, Blimbing Sari, dan Pantai Boom. Ketiga lokasi tersebut dipilih sebagai representasi kawasan wisata pantai yang menghadapi permasalahan serupa terkait pengelolaan sampah. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi pengelolaan sampah di ketiga lokasi wisata, menganalisis distribusi dan penyebaran sampah di kawasan wisata pantai, merumuskan strategi pengelolaan sampah menggunakan pendekatan analisis SWOT, serta mengevaluasi efektivitas sistem pengelolaan sampah yang sudah ada di lokasi-lokasi tersebut.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab penyebaran sampah di pantai karena banyak orang yang terbiasa membuang sampah di sungai sehingga sampah rumah tangga terbawa ke laut dan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Meskipun ada beberapa tempat sampah di lokasi wisata tetapi keberadaan tempat sampah tersebut kurang berfungsi dan kurang terawat dengan baik sehingga tidak menarik wisatawan untuk membuang sampah pada tempatnya.

Penelitian	Judul	Tujuan	Hasil
Kartikasari, B., Sari, H. P., & Masruroh, U. (2022), Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan, UGM.	Peran CSR PHE WMO Dalam Pengelolaan Sampah Kawasan Wisata Pantai Pasir Putih Tlangoh, Tanjungbumi, Bangkalan	Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis peran Corporate Social Responsibility (CSR) PHE WMO dalam pengelolaan sampah di kawasan wisata Pantai Pasir Putih Tlangoh. Secara spesifik, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi program-program CSR PHE WMO yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di kawasan wisata pantai, menganalisis efektivitas implementasi program CSR dalam mengatasi permasalahan sampah di lokasi wisata, mengevaluasi peran stakeholder terutama perusahaan dalam kolaborasi pengelolaan lingkungan kawasan wisata, mengkaji dampak program CSR terhadap kebersihan dan keberlanjutan kawasan wisata, serta merumuskan model kemitraan antara perusahaan, pemerintah, dan	Hasil penelitian mengungkapkan temuan-temuan signifikan yang memberikan kontribusi penting bagi pengembangan model pengelolaan sampah kawasan wisata berbasis kemitraan multi-stakeholder. Empat program unggulan PHE WMO adalah Program Taman Pendidikan Mangrove, Program Wisata Pantai Pasir Putih Tlangoh, Program Wisata Laut Labuhan dan Eco Edufarming Bandangdaja. Program ini menitikberatkan pada sektor wisata melalui pengembangan pariwisata di pesisir utara Bangkalan, Jawa Timur dengan target mewujudkan One Belt One Road (OBOR) pariwisata setempat. Khusus untuk Program Wisata Pantai Pasir Putih Tlangoh, implementasi CSR mencakup pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah, program edukasi lingkungan kepada masyarakat dan wisatawan, serta pemberdayaan masyarakat lokal dalam menjaga kebersihan kawasan wisata.

Penelitian	Judul	Tujuan	Hasil
		masyarakat dalam pengelolaan sampah kawasan wisata.	
Adinda Syalwa Jayantri, Mohammad Agung Ridlo, (2021), Jurnal Kajian Ruang	STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN PANTAI	Tujuan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk mengetahui berbagai jenis sampah dan bagaimana cara pengelolaannya di kawasan pantai. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik dan komposisi sampah yang dihasilkan di kawasan pantai, menganalisis kondisi eksisting sistem pengelolaan sampah di berbagai kawasan pantai Indonesia, mengevaluasi efektivitas strategi pengelolaan sampah yang telah diterapkan di kawasan pesisir, mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan penumpukan sampah di kawasan pantai, serta merumuskan strategi pengelolaan sampah yang tepat dan berkelanjutan untuk kawasan pantai. Penelitian ini	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di kawasan pantai merupakan masalah penting yang perlu ditangani. Penelitian ini menampilkan enam studi kasus tentang strategi pengelolaan sampah di beberapa wilayah pesisir di Indonesia, termasuk pengelolaan sampah di Pantai Kota Pariaman, Pantai Parangtritis, Pantai Pangandaran, Pantai Pulang Sawal Gunungkidul, Pantai Baru Bantul, dan Pantai Candikusuma di Kabupaten Jembrana, Bali. Sampah yang dihasilkan di kawasan pantai terdiri dari dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Pengelolaan sampah dilakukan dengan memisahkan jenis sampah dan mendaur ulang sampah anorganik untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomis.

Penelitian	Judul	Tujuan	Hasil
		juga bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan model pengelolaan sampah yang dapat diadaptasi di berbagai kawasan pantai dengan karakteristik yang berbeda.	



1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

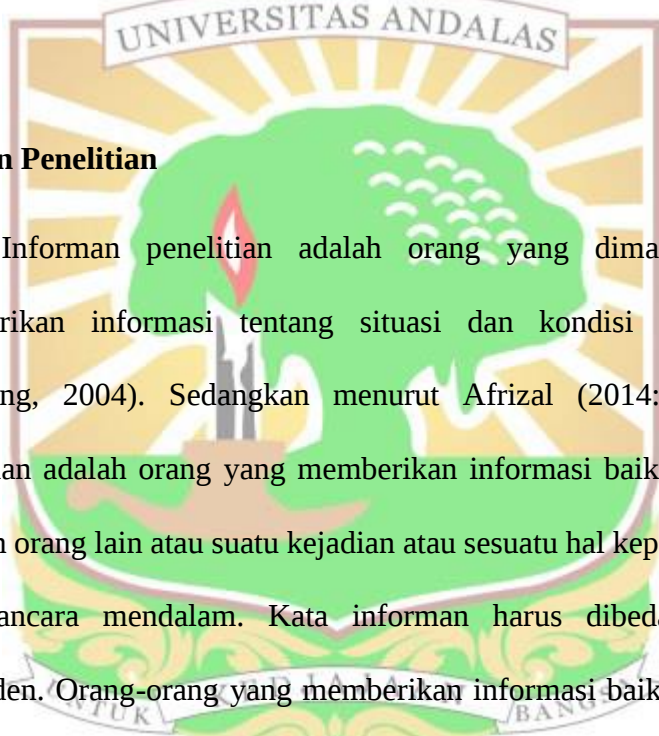
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian ilmu sosial yang bertujuan mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisa angka-angka (Afrizal, 2014: 139). Penelitian kualitatif dilakukan pada obyek alamiah yaitu obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument (peneliti itu sendiri) untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna atau data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2013).

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, artinya mendeskripsikan dan menggambarkan suatu fenomena, metode deskriptif

merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu situasi maupun kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Natsir, 1988). Dengan adanya pendekatan dan tipe penelitian ini, penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan dan menjelaskan serta menggambarkan bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan sampah Di Kawasan Wisata Pantai Gandorih Kota Pariaman

1.6.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2004). Sedangkan menurut Afrizal (2014:139), informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau sesuatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Kata informan harus dibedakan dari kata responden. Orang-orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian disebut sebagai informan, sedangkan untuk orang-orang yang hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan pewawancara tentang dirinya dengan hanya merespon pertanyaan-pertanyaan pewawancara bukan memberikan informasi atau keterangan disebut sebagai responden. Dalam sebuah penelitian ada dua kategori informan yaitu informan pengamat dan informan pelaku (Afrizal, 2014)



a) Informan Pelaku merupakan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di kawasan Pantai Gandoriah, baik dari sisi kebijakan, perencanaan, maupun operasional lapangan. Kelompok ini terdiri dari aparatur Dinas Perkim LH dan Dinas Pariwisata Kota Pariaman, mulai dari level kepala bidang hingga petugas kebersihan lapangan yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam mengimplementasikan program-program kebersihan. Informan pelaku dipilih berdasarkan kriteria memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang pengelolaan sampah, memahami kondisi riil di lapangan, serta terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembersihan kawasan pantai. Mereka diharapkan dapat memberikan informasi mendalam tentang mekanisme pengelolaan sampah, kendala operasional, efektivitas program yang telah berjalan, serta kebutuhan pengembangan sistem pengelolaan sampah ke depan.

b) Informan Pengamat adalah pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan sampah namun merasakan dampak dari kondisi kebersihan Pantai Gandoriah dan dapat memberikan perspektif eksternal yang objektif tentang efektivitas pengelolaan sampah. Kelompok ini meliputi pedagang yang beroperasi di sekitar pantai, wisatawan yang

berkunjung secara reguler, serta masyarakat sekitar yang memanfaatkan kawasan pantai untuk berbagai aktivitas. Kriteria pemilihan informan pengamat meliputi: untuk pedagang minimal beroperasi 2 tahun di kawasan pantai dan memahami pola sampah dari aktivitas perdagangan; untuk wisatawan minimal pernah berkunjung 3 kali dalam setahun terakhir dan dapat memberikan perbandingan kondisi kebersihan dari waktu ke waktu; serta memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan dan kebersihan pantai. Informan pengamat diharapkan dapat memberikan evaluasi objektif tentang kondisi kebersihan pantai, dampak sampah terhadap aktivitas ekonomi dan pariwisata, serta masukan untuk perbaikan sistem pengelolaan sampah dari perspektif pengguna dan penerima manfaat.

Pemilihan informan dalam penelitian ini, maka peneliti memakai teknik purposive sampling. Purposive sampling yaitu peneliti menetapkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Menurut Afrizal (2014:140), arti mekanisme sengaja yaitu sebelum melakukan penelitian para peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang dijadikan sumber informasi. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, peneliti telah mengetahui identitas orang-orang yang akan dijadikan informan penelitiannya sebelum penelitian dilakukan. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berpengetahuan

mengenai hal yang diteliti. Peneliti telah menetapkan kriteria untuk informan agar penelitian tetap berfokus pada bidang kajian penelitian. Penetapan kriteria informan penelitian tersebut antara lain:

Tabel 1.5 Informan Penelitian

No	Nama	Usia (Tahun)	Kriteria informan	Status
1	Zulhendra S.sos	45	Pelaku	Kepala bidang kebersihan PERKIM LH
2	Rica Seprianto A.Md.Kom	32	Pelaku	Staff Bidang Kebersihan PERKIM LH
3	Buyung Mariadi	47	Pelaku	Pengawas Kebersihan PERKIM LH
4	Ratna Juita	51	Pelaku	Staff Dinas Pariwisata
5	Irwansyah	30	Pelaku	Petugas Kebersihan (area jalan)
6	Karminalti	48	Pelaku	Petugas Kebersihan (area jalan)
7	Syahrial	32	Pelaku	Petugas Kebersihan (area pesisir)
8	Gusniati	47	Pelaku	Petugas Kebersihan (area pesisir)
9	Yuliarni	52	Pengamat	Pedagang
10	Asmanidar	49	Pengamat	Pedagang
11	Indra Akmel	24	Pengamat	Wisatawan

Sumber: Diolah penulis

1.6.3 Data yang Diambil

Menurut Afrizal pada penelitian kualitatif data yang diambil adalah berupa kata-kata (lisan atau tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia tanpa ada upaya untuk mengkuantifikasikan data yang telah diperoleh, Metode penelitian kualitatif dikatakan sebagai sebuah metode penelitian yang datanya dikumpulkan berupa kata-

kata dan gambar, bukan angka-angka. Dalam penelitian kualitatif terdapat dua sumber data (Sugiyono, 2013), yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data dan informasi yang didapatkan langsung dari informan saat berada dilapangan. Untuk memperoleh data primer diperlukan teknik wawancara mendalam dan observasi agar mendapatkan data yang diinginkan (Moleong, 2004). Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data primer adalah berupa informasi-informasi dari hasil wawancara mendalam informan maupun hasil observasi di lokasi penelitian yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Permasalahan Sampah di Kawasan Wisata Pantai Gandoriah Kota Pariaman

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah memperoleh data secara tidak langsung seperti mendapatkan data melewati orang lain dan melalui dokumen-dokumen. Untuk mendapatkan data sekunder dapat melalui studi kepustakaan seperti buku, skripsi, jurnal, foto-foto ataupun mempelajari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan masalah penelitian (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini yang dijadikan data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang mendukung serta menjelaskan data primer yang sudah diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian.

1.6.4 Proses Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan observasi awal di Pantai Gandorih pada Juni 2024 untuk mengamati kondisi sampah di kawasan wisata pantai gandorih. Saya melakukan pemetaan lokasi dan mengidentifikasi jenis-jenis sampah yang ada di kawasan tersebut. Dari observasi awal ini, saya melihat beberapa fasilitas pengelolaan sampah seperti tempat sampah yang rusak dan banyak sampah yang berserakan di kawasan tersebut. Observasi ini memberikan gambaran awal tentang situasi di lapangan dan membantu saya merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang lebih mendalam. Selama observasi ini, saya juga mengambil foto-foto lokasi, termasuk kondisi sampah, fasilitas pengelolaan sampah, serta interaksi antara pedagang dan pengunjung untuk dijadikan data visual pendukung.

Setelah melakukan observasi awal, saya mengurus izin penelitian dari kampus pada 18 Februari 2025, dan kemudian mengurus izin penelitian dari Dinas PTSP Kota Pariaman pada 25 Februari 2025. Saya kembali ke lokasi penelitian pada 26 Februari 2025 dan melakukan observasi lebih mendalam tentang aktivitas wisatawan, pedagang, serta petugas kebersihan dalam membersihkan sampah, terutama memperhatikan sikap kebersihan mereka terhadap sampah, fasilitas pengelolaan sampah, serta mekanisme pengelolaan sampah. Observasi ini saya lakukan pada jam yang berbeda-beda untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang aktivitas di kawasan Pantai Gandorih. Saya juga mencatat

adanya perbedaan produksi sampah yang dihasilkan antara hari biasa dan akhir pekan, yang ternyata sangat memengaruhi. Pada kesempatan ini, saya mulai melakukan pendekatan informal dengan beberapa petugas kebersihan, wisatawan dan pedagang untuk komunikasi sebelum melakukan wawancara mendalam.

Wawancara mendalam dengan para informan dilakukan mulai tanggal 27 Februari sampai 19 Maret 2025. Saya melakukan wawancara dengan 10 orang terdiri dari Kepala Bidang Kebersihan PERKIM LH, Staff PERKIM LH, Pengawas Kebersihan PERKIM LH, 4 orang petugas kebersihan sebagai informan pelaku serta 2 orang pedagang dan 1 orang wisatawan sebagai informan pengamat. Dalam melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan, Staff dan Pengawas saya mendatangi kantor Dinas Perkim LH Kota Pariaman, kemudian saya memperkenalkan diri, melakukan pendekatan serta menjelaskan maksud dan tujuan, mereka menyambut saya dengan baik dan meminta surat izin penelitian saya untuk ke legalan penelitian saya ini sebelum meminta kesediaan mereka untuk diwawancarai. Pendekatan ini efektif dalam menciptakan suasana wawancara yang santai dan terbuka, sehingga informan dapat menjawab pertanyaan dengan jujur dan mendetail. Wawancara saya rekam menggunakan perekam suara setelah mendapatkan persetujuan dari informan, dan saya juga membuat catatan lapangan.

Analisis data saya lakukan setelah semua wawancara selesai dengan menggunakan pendekatan dari Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pertama, saya mentranskripsikan seluruh hasil wawancara dan membaca berulang kali untuk mendapatkan

pemahaman menyeluruh. Kemudian saya melakukan pengkodean terhadap transkrip wawancara untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul, seperti faktor ekonomi, kondisi fasilitas, dan masalah pengawasan. Proses pengkodean ini membantu saya mengelompokkan data dan melihat pola-pola yang muncul dari berbagai informan. Menariknya, meskipun saya mewawancarai informan yang berbeda, banyak tema yang konsisten muncul dalam jawaban mereka, yang memperkuat validitas temuan penelitian. Selama proses analisis, saya juga mengidentifikasi kutipan-kutipan penting yang representatif untuk digunakan sebagai bukti pendukung dalam penulisan hasil penelitian.

Dalam menguji keabsahan data, saya menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan memeriksa konsistensi informasi dari berbagai informan, baik dari pejabat pemerintah, staff, pengawas serta petugas kebersihan PERKIM LH sebagai pelaku utama, maupun pedagang, wisatwan dan tokoh masyarakat sebagai pengamat. Hal ini memungkinkan saya mendapatkan perspektif yang beragam tentang fenomena yang sama, sekaligus mengidentifikasi di mana terdapat kesamaan dan perbedaan pandangan. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara dengan hasil observasi langsung dan dokumen-dokumen yang tersedia, seperti peraturan daerah tentang kebijakan dan pengelolaan sampah serta dokumentasi kondisi sampah di kawasan wisata Pantai Gandorih.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara mengumpulkan data yang diperlukan oleh peneliti, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara menggunakan teknik tertentu serta data yang telah terkumpul sebelumnya dapat dianalisis. Sedangkan alat pengumpulan data ialah alat- alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data.

Berikut merupakan alat-alat yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

1. Panduan atau pedoman wawancara mendalam. suatu tulisan yang berisikan daftar informasi yang akan atau perlu dikumpulkan.
2. Buku catatan dan pena : berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. Sekarang sudah banyak komputer yang kecil, notebook yang dapat digunakan untuk membantu mencatat data hasil wawancara.
3. Handphone. Peneliti menggunakan handphone sebagai alat perekam untuk tape recorder, kamera, dan telepon untuk merekam hasil wawancara mendalam serta dokumentasi.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi

Tabel 1.6

Teknik Pengumpulan Data

Data Yang Diambil		Teknik Pengumpulan Data		
		Observasi	Wawancara Mendalam	Dokumentasi
Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Permasalahan Sampah di Kawasan Wisata Pantai Gandorih Kota Pariaman	Mendeskripsikan upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sampah di kawasan wisata pantai gandorih kota pariaman	✓	✓	✓
Sampah di Kawasan Wisata Pantai Gandorih Kota Pariaman	Mendeskripsikan kebijakan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sampah di kawasan wisata pantai gandorih kota pariaman	✓	✓	✓

Sumber: Data Primer 2024

1. Observasi

Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dengan cara melihat serta mengamati fenomena sosial yang terjadi secara langsung dari setiap aktivitas yang terjadi saat penelitian. Observasi dapat dilakukan dengan menggunakan panca indra langsung terhadap objek, situasi maupun perilaku. Observasi digunakan sebagai metode utama selain wawancara karena dengan melakukan observasi bisa melihat dan mendengar apa yang sedang terjadi.

Pengamatan itu dilakukan untuk mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada kenyataannya, dan peneliti dapat mengetahui situasi perilaku objek tersebut (Moleong, 2004). Peneliti menggunakan cara observasi non partisipan yakni peneliti hanya berperan sebagai pengamat dan tidak ikut dalam kehidupan orang yang akan di observasi. Data observasi merupakan data yang faktual, cermat, dan terperinci tentang keadaan yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi Di Kawasan Wisata Pantai Gandodriah.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (face to face) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam. wawancara mendalam merupakan sebuah interaksi social informal antaran seorang peneliti dengan para informannya. Wawancara mendalam dilakukan dengan mendalami informasi dari seorang infoman

dengan bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari hasil data percakapan. Diperlukannya konfirmasi data dengan melakukan wawancara berulang kali dengan tujuan klarifikasi terhadap informasi yang sudah didapat dalam wawancara (Afrizal, 2014). Wawancara mendalam dapat dilakukan di dalam ruangan kantor, rumah, maupun luar ruangan. Sebelum melakukan wawancara tentu peneliti membuat kesepakatan bersama informan dan jika informasi dirasa kurang peneliti kembali membuat janji dengan informan. Peneliti menggunakan Teknik ini untuk memberikan kesempatan kepada informan untuk menceritakan segala hal yang terkait dengan Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Permasalahan Sampah di Kawasan Wisata Pantai Gandoriah Kota Pariaman.

3. Dokumentasi

Hasil wawancara dan observasi diperlukannya dokumentasi agar data yang diperoleh diperkuat oleh dokumentasi. Dalam penelitian ini dokumentasi berupa jurnal, literatur, penelitian terdahulu, buku yang berkaitan dengan penelitian dan internet.

1.6.6 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian penting ditentukan secara jelas agar tidak keliru dalam menentukan hal apa atau siapa yang akan diteliti. Tujuan dari unit analisis data ialah untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau dengan kata lain subjek yang diteliti ditentukan dengan kriteria yang disesuaikan

dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis terdiri dari individu, kelompok, lembaga (keluarga, perusahaan, organisasi, negara, dan komunitas). Unit analisis dalam penelitian ini ialah kelompok yaitu Pemerintah Daerah atau Dinas Perkim LH Kota Pariaman.

1.6.7 Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis data untuk menggali makna dan pola dalam data. Analisis data penelitian kualitatif merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian serta saling keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi (Afrizal, 2014). Salah satu tujuan dari analisa data adalah menyederhanakan data.

Analisis data yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman membagi analisis data menjadi tiga tahap secara garis besar, yaitu :

1. Kodifikasi Data

Tahap ini merupakan tahap pengkodean terhadap data. Hal yang mereka maksud dengan pengkodean data adalah peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Peneliti menulis ulang catatan lapangan yang dibuat ketika melakukan wawancara kepada informan jika berbentuk rekaman wawancara maka peneliti melakukan transkrip. Kemudian catatan lapangan tersebut diberikan kode atau tanda untuk informasi yang penting. Sehingga peneliti menemukan mana informasi yang penting dan

tidak penting. Informasi penting yaitu informasi yang berkaitan dengan topik penelitian, sedangkan data yang tidak penting berupa pernyataan informan yang tidak berkaitan. Hasil dari kegiatan tahap pertama adalah diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. Tema-tema atau klasifikasi itu telah mengalami penanaman oleh peneliti (Afrizal, 2014).

1. Penyajian Data

Sebuah tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Miles dan Huberman menganjurkan untuk menggunakan matrix dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian agar lebih efektif (Afrizal, 2014).

2. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti memverifikasi atau menarik kesimpulan dari temuan di lapangan dapat berupa wawancara, catatan observasi maupun dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan (Afrizal, 2014).

1.6.8 Definisi Konsep Operasional

Definisi operasional digunakan untuk memastikan pemahaman yang jelas dan menghindari kesalahpahaman mengenai data yang akan dikumpulkan. Berikut adalah definisi operasional untuk variabel-variabel dalam penelitian ini:

1. Peran Pemerintah Daerah

Peran pemerintah daerah dalam penelitian ini didefinisikan sebagai fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pariaman melalui Dinas Perkim LH dan instansi terkait dalam mengatasi permasalahan sampah di kawasan wisata Pantai Gandoriah.

2. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah dalam konteks penelitian ini merujuk pada serangkaian kegiatan sistematis dan terencana yang dilakukan untuk menangani sampah di kawasan wisata Pantai Gandoriah mulai dari tahap pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir

3. Kawasan Wisata Pantai

Kawasan wisata pantai dalam penelitian ini didefinisikan sebagai area geografis Pantai Gandoriah Kota Pariaman yang dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi, mencakup wilayah pantai, area komersial pedagang kuliner, fasilitas pendukung wisata, serta zone penyangga di sekitarnya.

1.6.9 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai setting atau tempat dilakukan sebuah penelitian. Tempat tersebut tidak selalu mengacu pada lokasi penelitian tetapi bisa juga pada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014). Penelitian ini dilaksanakan di kawasan wisata Pantai Gandoriah yang terletak di Kota Pariaman,

Provinsi Sumatera Barat. Pantai Gandoriah dipilih sebagai lokasi penelitian karena merepresentasikan kasus yang relevan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah kawasan wisata.

1.6.10 Rancangan Jadwal Penelitian

Penelitian telah dilakukan selama 12 bulan, yang dimulai dari bulan Mei 2024 sampai bulan Mei 2025. Untuk lebih jelasnya berikut jadwal penelitian pada tabel tersebut:

Tabel 1.7 Rancangan Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	2024										2025					
		Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
1	Seminar Proposal																
1	Penelitian Lapangan																
2	Analisis Data																
3	Bimbingan Skripsi																
4	Ujian Komprehensif																